DAMPAK PEMBERDAYAAN GENDER DAN PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT

TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Magister Ekonomi Pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Universitas Tanjungpura

WENICA
NIM. B2052211005

PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Dampak Pemberdayaan Gender Dan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh :

Nama	:	Wenica
NIM	:	B2052211005
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Tanggal Ujian	:	31 Juli 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister.

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/Bln/ Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Utama	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si. NIP 19720607 199803 2 001	22/8/2025	
Pembimbing Pendamping	Dr. H. Wahyudi, S.E., M.Si. NIP 19631209 198903 1 004	19-08-2025	
Ketua Penguji	Dr. Rosyadi, S.E., M.Si. NIP 19650921 199303 1 001	16-08-2025	
Anggota Penguji	Dr. Jumhur, S.E., M.Si. NIP 19670928 199702 1 001	16-08-2025	

Pontianak, 25 Agts 2025
Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si.
NIP 19720607 199803 2 001

PERTANGGUNGJAWABAN TESIS

Nama	:	Wenica
NIM	:	B2052211005
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul proposal	:	Dampak Pemberdayaan Gender Dan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Agustus 2025



Wenica
NIM. B2052211005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Nama	:	Wenica
NIM	:	B2052211005
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Dampak Pemberdayaan Gender Dan Penduduk Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Agustus 2025



Wenica

NIM. B2052211005

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Dampak Pemberdayaan Gender dan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Ditamatkan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh pemberdayaan gender serta tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis, khususnya dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di daerah tersebut.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan tesis ini, tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Wahyudi, SE. M.Si selaku pembimbing II , yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Rosyadi, SE. M.Si selaku Ketua Penguji dan Bapak Dr. Jumhur SE. M.Si selaku Penguji II yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan koreksi demi kesempurnaan karya ini.
3. Serta seluruh dosen dan staf administrasi di Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama masa studi.
4. Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moral yang tiada henti.
5. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi kontribusi kecil dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan di Kalimantan Barat.

Pontianak, September 2025
Penulis

Wenica

DAMPAK PEMBERDAYAAN GENDER DAN PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN BARAT

Wenica
B2052211005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah analisis data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPG, tingkat pendidikan SD, dan tingkat pendidikan SMP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan tingkat pendidikan SMA menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan dasar dan menengah pertama memiliki peran penting dalam membentuk modal manusia produktif, sementara lulusan SMA belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja ekonomi. Faktor-faktor seperti relevansi kurikulum, keterbatasan kesempatan kerja, dan keterhubungan antara pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi tantangan yang perlu diatasi. Implikasi kebijakan dari penelitian ini menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan berkualitas, penguatan pemberdayaan gender, serta revitalisasi pendidikan menengah atas agar lebih adaptif terhadap tuntutan pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: Pemberdayaan Gender, Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi

THE IMPACT OF GENDER EMPOWERMENT AND THE POPULATION BASED ON COMPLETED EDUCATION ON ECONOMIC GROWTH IN WEST KALIMANTAN

Wenica
B2052211005

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the Gender Empowerment Index (IPG), Pure Participation Rate of Elementary Schools (SD), Junior High School (SMP), and Senior High School (SMA) on the economic growth of districts/cities in West Kalimantan Province. The method used is panel data analysis with a Random Effect Model (REM) approach, utilizing secondary data from various official sources. The results of the study showed that IPG, elementary education level, and junior high school education level had a positive and significant effect on regional economic growth, while high school education level showed a negative and insignificant influence. These findings indicate that primary and junior secondary education has an important role in shaping productive human capital, while high school graduates are not fully able to make an optimal contribution to improving economic performance. Factors such as curriculum relevance, limited employment opportunities, and the connection between education and the needs of the job market are challenges that need to be overcome. The policy implications of this study emphasize the importance of equitable access to quality education, strengthening gender empowerment, and revitalizing upper secondary education to be more adaptive to the demands of economic development.

Keywords: *Gender Empowerment, Education, Economic Growth*

RINGKASAN

BAB I Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Fokus utamanya adalah menganalisis pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dan angka partisipasi murni pada berbagai jenjang pendidikan (SD, SMP, dan SMA) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Penjelasan latar belakang didukung data statistik dan hasil penelitian terdahulu, yang menguatkan urgensi kajian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori relevan seperti *Human Capital Theory*, konsep pemberdayaan gender, dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, disajikan kajian empiris dari berbagai penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara IPG, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, baik di Indonesia maupun internasional. Kerangka pemikiran penelitian juga dijabarkan sebagai dasar dalam penyusunan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, jenis data, sumber data, variabel yang digunakan, serta metode analisis. Penelitian menggunakan data panel kabupaten/kota di Kalimantan Barat dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM). Penjelasan juga mencakup operasionalisasi variabel, model persamaan yang digunakan, serta alasan pemilihan metode analisis tersebut.

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil analisis statistik, meliputi uji asumsi model, estimasi koefisien, serta interpretasi hasil. Pembahasan dilakukan untuk masing-masing variabel: IPG, angka partisipasi murni SD, SMP, dan SMA. Ditemukan bahwa IPG, pendidikan SD, dan SMP berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pendidikan SMA berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penjelasan diberikan dengan mengaitkan hasil tersebut pada teori dan temuan empiris sebelumnya.

BAB V

Bab terakhir berisi kesimpulan penelitian berdasarkan hasil analisis, yang menegaskan pengaruh positif IPG, SD, dan SMP terhadap pertumbuhan ekonomi, serta lemahnya kontribusi SMA. Saran penelitian diarahkan pada kebijakan yang membangun, seperti beasiswa afirmatif, penguatan kualitas pendidikan, keterkaitan pendidikan dengan pasar kerja, dan pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TESIS ..... **ii**
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT ..... **iii**
KATA PENGANTAR ..... **iv**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
RINGKASAN ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 16
1.2.1 Pernyataan Masalah 16
1.2.2 Pertanyaan Penelitian 17
1.3 Tujuan Penelitian 17
1.4 Kontribusi Penelitian 18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**
2.1 Landasan Teori 19
2.1.1 Teori Modal Manusia (*Human capital Theory*) 19
2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi dan Gender (*Gender and Development Theory*) 20
2.1.3 Pengaruh Indeks Pemberdayaan Gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi 22
2.1.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 24
2.2 Kajian Empiris 26
2.2.1 Pengaruh Indeks Pemberdayaan gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi 26
2.2.2 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 28
2.2.3 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama terhadap Pertumbuhan Ekonomi 29
2.2.4 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas terhadap Pertumbuhan Ekonomi 31
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 34
2.3.1 Kerangka Konseptual 34
2.3.2 Hipotesis Penelitian 34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 35
3.1 Bentuk Penelitian 35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 35
3.3 Jenis dan Sumber Data 35
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 36
3.5 Metode dan Alat Analisis 37
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 37
3.5.2 Regresi Linier Berganda 37
3.5.3 Estimasi Model 38
3.5.4 Uji Model 39
3.5.5 Pengujian Hipotesis 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Hasil Penelitian 42
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif 42
4.1.2 Pemilihan Model Analisis 43
4.1.3 Regresi Data Panel 46
4.1.4 Pengujian Hipotesis 48
4.2 Pembahasan 51
4.2.1 Pengaruh Indeks Pemberdayaan gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi 51
4.2.2 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar terhadap Pertumbuhan Ekonomi 53
4.2.3 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama terhadap Pertumbuhan Ekonomi 55
4.2.4 Pengaruh Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas terhadap Pertumbuhan Ekonomi 58
BAB V PENUTUP 61
5.1 Kesimpulan 61
5.2 Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen) 3
Tabel 1.2 Indeks Pemberdayaan gender Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 6
Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)..... 10
Tabel 1.4 Angka Partisipasi Murni (SMP/MTs/Paket B) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)..... 12
Tabel 1.5 Angka Partisipasi Murni (SMA/MA/Paket C) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)..... 14
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel 36
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif..... 42
Tabel 4.2 Uji Chow 44
Tabel 4.3 Uji Hausman..... 45
Tabel 4.4 Uji Lagrange Multiplier 45
Tabel 4.5 Random Effect Model 46
Tabel 4.6 Uji t-statistik..... 48
Tabel 4.7 Uji F-statistik..... 49
Tabel 4.8 Uji Koefesian Determinan (R^2) 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 34

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja perekonomian suatu negara atau daerah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Proses ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang menggunakan berbagai faktor produksi untuk menciptakan output, yang kemudian menghasilkan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Pada akhirnya, aliran balas jasa ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Suhada dkk., 2022).

Menurut Sukirno (2013), pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai proses kenaikan output per kapita secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Istilah ini seringkali disandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi, meskipun keduanya memiliki cakupan berbeda. Pertumbuhan ekonomi lebih menekankan pada peningkatan kuantitatif Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan pembangunan ekonomi mencakup aspek yang lebih luas, seperti perubahan struktur ekonomi, distribusi pendapatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan penduduk menjadi fondasi utama dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Setiap negara berupaya memaksimalkan potensi sumber dayanya untuk mendorong pertumbuhan ini. Dalam pandangan Kuznets, sebagaimana dikutip oleh Todaro & Smith (2020), pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga menuntut adanya kemajuan teknologi serta penyesuaian kelembagaan dan nilai-nilai sosial terhadap dinamika perubahan yang terjadi.

Dalam kerangka pembangunan yang berorientasi pada inklusivitas, pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata ditujukan untuk peningkatan output, melainkan juga untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. Arifin (2018) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah pertumbuhan yang

disertai pemerataan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan tidak hanya menjadi simbol keberhasilan makroekonomi, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan akhir dari pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Patel dkk. (2012), kesejahteraan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dalam aspek sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pertumbuhan yang berkualitas adalah pertumbuhan yang mampu menciptakan peluang ekonomi yang merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja ekonomi di tingkat wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB memberikan gambaran tentang kapasitas daerah dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yunianto (2021) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan nilai PDRB merupakan indikator makroekonomi yang relevan dalam menggambarkan dinamika ekonomi suatu daerah secara riil.

Dalam perspektif ekonomi klasik, Smith menguraikan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang terdiri dari dua komponen utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Keduanya saling terkait, karena peningkatan output akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya memengaruhi struktur demografi, dinamika ketenagakerjaan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Dalam konteks kontemporer, seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk juga menghadirkan tantangan baru, salah satunya dalam pemberdayaan gender, khususnya terkait dengan partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja dan akses terhadap kepemilikan sumber daya.

Mankiw (2018) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ditandai oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang diukur melalui PDB atau PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan Mulyadi & Sandi (2018) menambahkan bahwa pertumbuhan juga mencerminkan peningkatan kualitas produksi, bukan hanya dari sisi kuantitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Sukirno (2013) bahwa

pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat meningkat secara berkesinambungan dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	5,06	4,93	4,75	-2,04	4,37	4,64	4,69
Bengkayang	5,62	5,25	5,14	-1,99	4,33	5,45	4,68
Landak	5,17	4,92	4,90	-0,71	4,88	4,64	4,39
Mempawah	5,87	5,76	5,78	0,18	4,10	4,70	5,09
Sanggau	4,48	4,21	3,73	0,71	4,19	4,61	2,04
Ketapang	7,21	7,83	6,58	-0,49	5,23	5,42	1,10
Sintang	5,33	5,15	4,99	-2,19	3,80	4,96	4,68
Kapuas Hulu	5,39	4,66	3,80	-2,43	4,43	4,51	4,62
Sekadau	5,82	5,83	5,44	-0,98	4,31	5,10	4,69
Melawi	4,70	5,25	4,41	-1,11	4,54	4,90	4,56
Kayong Utara	5,37	4,94	4,97	-0,76	4,60	5,03	4,48
Kubu Raya	6,54	5,25	5,68	-2,39	5,18	5,48	4,98
Kota Pontianak	4,96	4,22	4,02	-3,96	4,61	4,97	4,76
Kota Singkawang	5,38	4,64	4,41	-2,51	4,82	4,97	5,06
Kalimantan Barat	5,17	5,07	5,09	-1,82	4,80	5,07	4,46

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat dari tahun 2017 hingga 2023. Data ini mencerminkan dinamika ekonomi yang berfluktuasi, dengan periode 2020 menjadi titik terendah bagi hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi ini, yang sebagian besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020, hampir semua daerah mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan, dengan penurunan yang cukup tajam, terutama di Kota Pontianak (-3,96 persen), Kota Singkawang (-2,51 persen), dan Kabupaten Sambas (-2,04 persen). Penurunan ini menggambarkan dampak buruk pandemi terhadap berbagai sektor ekonomi, seperti produksi, konsumsi, dan investasi, yang menyebabkan stagnasi

ekonomi yang hampir merata di seluruh wilayah. Namun, beberapa kabupaten mengalami pemulihan yang relatif cepat pada tahun 2021 dan 2022, seperti Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah, yang masing-masing mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,45 persen dan 4,70 persen pada tahun 2022. Pemulihan ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan besar dihadapi, beberapa daerah mampu beradaptasi dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada.

Secara keseluruhan, Kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak menunjukkan pola pertumbuhan yang berbeda. Kabupaten Ketapang, yang sebelumnya mencatatkan laju pertumbuhan tinggi pada 2017 (7,21 persen) dan 2018 (7,83 persen), mengalami penurunan tajam pada 2020 (-0,49 persen) dan hanya tercatatkan pertumbuhan 1,10 persen pada 2023. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh ketergantungan daerah ini pada sektor ekstraktif seperti pertambangan, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Di sisi lain, Kota Pontianak, meskipun mengalami kontraksi signifikan pada 2020 (-3,96 persen), memperlihatkan pemulihan stabil pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan yang relatif konsisten pada 2021 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kota Pontianak lebih terdiversifikasi dan lebih tahan terhadap guncangan eksternal dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya.

Sementara itu, daerah seperti Landak, Sanggau, dan Sintang meskipun mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu, terutama pada 2020, namun laju pertumbuhannya cenderung stabil. Hal ini mencerminkan ketahanan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian eksternal, dengan beberapa sektor ekonomi lokal yang lebih resilient terhadap perubahan pasar dan kondisi global.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Kalimantan Barat menghadapi penurunan ekonomi yang signifikan pada 2020, wilayah ini secara umum menunjukkan kapasitas untuk bangkit dan beradaptasi. Variasi yang ada antara kabupaten/kota mencerminkan pentingnya kebijakan yang dapat mendukung ketahanan ekonomi, memperkuat sektor-sektor strategis, dan

meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

Secara historis, perempuan kerap diposisikan sebagai penerima pasif dari hasil pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, peran aktif perempuan dalam proses pembangunan seringkali terpinggirkan. Padahal, ketika perempuan diberikan ruang dan kesempatan yang setara, pembangunan dapat berlangsung secara lebih inklusif dan menyeluruh tanpa meninggalkan ketimpangan struktural (Pertiwi dkk., 2021). Nursini & Syahrul (2022) menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang efektif tidak hanya tercermin dari meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tetapi juga dari peningkatan kualitas sumber daya manusia serta terciptanya pemberdayaan gender. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas idealnya juga mampu mengurangi ketimpangan gender serta menciptakan akses dan peluang yang adil bagi seluruh penduduk tanpa memandang jenis kelamin (Arifin, 2018).

Sayangnya, dalam praktik pembangunan di banyak daerah, perempuan masih sering dipandang sebagai kelompok sekunder yang tidak memiliki pembangunan hak dan kesempatan dengan laki-laki. Pandangan ini kerap didukung oleh nilai-nilai budaya dan pola pikir patriarkis yang mengakar kuat, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang relatif rendah. Stereotip bahwa perempuan hanya memiliki peran domestik telah mempersempit ruang partisipasi mereka di sektor publik dan dunia kerja. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar sebagai agen pembangunan (Padang dkk., 2019), yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ketika diberdayakan secara optimal.

Salah satu dimensi utama dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil adalah prinsip pembangunan, yang menegaskan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, berhak memperoleh manfaat dari pembangunan (Rahmawati & Hidayah, 2020). Dominasi budaya patriarkis di sejumlah wilayah, termasuk di Kalimantan Barat, menjadi hambatan struktural yang menghalangi perempuan dalam mengembangkan kapasitas dan potensi diri. Labelisasi perempuan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya, ditambah dengan

keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang ekonomi, memperkuat eksklusi perempuan dari proses pembangunan yang seharusnya inklusif (Pertiwi dkk., 2021; Septari dkk., 2022).

Tabel 1.2
Indeks Pemberdayaan gender
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023

Kab/Kota	Indeks Pemberdayaan gender Menurut Kabupaten/Kota						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	87,06	86,96	86,97	87,07	87,00	87,96	88,37
Bengkayang	82,81	82,81	82,82	82,78	82,79	82,86	83,68
Landak	87,87	87,90	87,92	88,14	88,44	88,83	89,45
Mempawah	86,98	87,76	87,78	87,92	87,80	88,53	88,90
Sanggau	80,38	80,59	80,92	81,04	81,19	82,14	82,66
Ketapang	87,84	88,41	88,52	88,42	88,60	89,12	89,46
Sintang	85,97	86,29	86,50	86,73	86,73	87,38	87,74
Kapuas Hulu	84,45	84,38	84,74	84,91	84,95	85,99	86,52
Sekadau	81,82	82,06	82,40	82,65	82,72	83,40	84,07
Melawi	79,79	79,75	80,08	80,10	80,15	80,82	81,22
Kayong Utara	85,14	85,19	85,73	85,75	86,04	87,07	86,80
Kubu Raya	84,05	84,57	84,60	84,30	84,30	85,26	85,45
Kota Pontianak	93,60	93,32	93,81	93,73	94,01	94,10	94,65
Kota Singkawang	91,98	91,91	92,21	92,00	92,00	92,83	93,05
Kalimantan Barat	86,28	86,74	86,81	86,87	86,95	87,61	88,06

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 hingga 2023, terdapat tren peningkatan yang positif, dari angka 86,28 menjadi 88,06. Hal ini menunjukkan kemajuan dalam pemberdayaan gender yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Namun demikian, meskipun terdapat peningkatan, angka IPG provinsi ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa kesenjangan gender di Kalimantan Barat masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses layanan dan sumber daya.

Secara spasial, perbedaan IPG antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat cukup signifikan. Kota Pontianak dan Kota Singkawang secara konsisten mencatat

IPG tertinggi, masing-masing mencapai 94,65 dan 93,05 pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi mampu memberikan kontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender. Sebaliknya, Kabupaten Melawi dan Sanggau menempati posisi dengan IPG terendah, yaitu sebesar 81,22 dan 82,66 pada 2023. Keterbatasan akses pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, serta kesempatan kerja bagi perempuan diduga menjadi faktor utama yang membatasi peningkatan IPG di daerah tersebut.

Kabupaten Ketapang dan Landak menunjukkan pertumbuhan IPG yang cukup signifikan selama periode tersebut, masing-masing meningkat menjadi 89,46 dan 89,45 pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar di daerah yang berbasis sektor primer seperti pertanian dan perkebunan. Sementara itu, beberapa kabupaten di wilayah perbatasan dan terpencil seperti Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kubu Raya masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan IPG, yang tercermin dari nilai IPG mereka yang masih berada di bawah angka provinsi. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan berbasis wilayah yang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan lokal secara spesifik.

Ketimpangan IPG antarwilayah di Kalimantan Barat cukup mencolok, dengan selisih nilai mencapai lebih dari 13 poin antara Kota Pontianak sebagai wilayah dengan IPG tertinggi dan Kabupaten Melawi dengan IPG terendah. Fenomena ini menegaskan bahwa upaya peningkatan pemberdayaan gender belum merata dan memerlukan intervensi kebijakan yang lebih fokus dan inklusif, terutama untuk daerah-daerah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, penguatan akses pendidikan, peningkatan partisipasi kerja perempuan, serta perbaikan layanan kesehatan reproduksi menjadi langkah strategis yang harus didorong oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, peningkatan IPG di Kalimantan Barat merupakan indikator positif bagi kemajuan pembangunan sosial yang inklusif. Namun, tantangan ketimpangan antarwilayah perlu menjadi perhatian serius agar

pertumbuhan ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan kebijakan yang responsif gender dan berbasis kebutuhan lokal menjadi kunci dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pengentasan kesenjangan gender di provinsi ini.

Kontribusi terhadap pembangunan sejatinya merupakan hak setiap warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung (Mulasari, 2015). Widayanti dkk. (2013) menekankan bahwa pemberdayaan gender merupakan dimensi fundamental dalam pembangunan manusia. Pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang berlangsung secara adil dan merata lintas generasi, gender, kelompok sosial, dan wilayah geografis. Pandangan ini sejalan dengan kerangka kerja global *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya Tujuan ke-5 yang secara eksplisit mendorong pemberdayaan gender dan pemberdayaan perempuan (Lusiarista & Arif, 2022).

Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya merupakan pemenuhan hak asasi dan keadilan sosial, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stereotip yang menganggap perempuan tidak aktif dalam kegiatan ekonomi perlu diluruskan, mengingat kenyataannya banyak perempuan berperan sebagai penopang, bahkan tulang punggung ekonomi keluarga melalui peran gandanya di ranah domestik maupun publik. Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, peningkatan peran perempuan menjadi prasyarat penting bagi terciptanya transformasi ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan yang inklusif, pemberdayaan gender merupakan elemen kunci yang tidak dapat dipisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya melalui peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan yang layak, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, semakin besar pula dampak positifnya terhadap

produktivitas, kreativitas, dan inovasi dalam dunia kerja. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Dengan demikian, pemberdayaan gender dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait dan saling menguatkan, membentuk sinergi yang secara langsung memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri, terutama dalam era otonomi daerah, menjadi salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan wilayah. Dalam kerangka ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sektor pendidikan memainkan peran utama untuk membentuk kemampuan mengembangkan kapasitas produksi agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan .

Sebagaimana dinyatakan oleh Budiarti (2017), pendidikan merupakan salah satu faktor paling krusial yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Peran strategis pendidikan juga ditegaskan oleh Todaro & Smith (2020), yang menyatakan bahwa sektor pendidikan memiliki kontribusi vital dalam membentuk kemampuan negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas produksi yang dibutuhkan guna mencapai pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pendidikan merupakan bentuk investasi yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi (Sukirno, 2013). Pendidikan tidak hanya meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Dalam jangka panjang, pendidikan menjadi instrumen utama untuk mengatasi keterbelakangan ekonomi melalui penguatan kapasitas individu, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pendidikan juga dikenal sebagai modal manusia (*human capital*) karena kontribusinya yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi (Putra & Arka, 2016). Pendidikan mendukung berbagai proses dan aktivitas ekonomi, menjadikannya sebagai pilar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sejalan

dengan pandangan Susanto dkk. (2018), yang menyebut bahwa pendidikan adalah alat strategis untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan, sebab melalui pendidikan kualitas hidup masyarakat di masa depan dapat ditingkatkan.

Peran pendidikan dalam dunia modern terus berkembang, seiring dengan meningkatnya pengaruh sumber daya manusia sebagai faktor yang paling menentukan dalam pembentukan kualitas ekonomi dan tatanan sosial masyarakat. kualitas sumber daya manusia yang terbentuk melalui pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi di masa depan (Lavrinovicha dkk., 2015).

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Murni (SD/MI/Paket A)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	97,04	96,91	97,31	97,52	97,38	98,52	98,48
Bengkayang	96,92	97,70	97,20	98,25	98,36	97,24	97,61
Landak	96,49	95,39	95,39	95,14	95,64	96,27	97,05
Mempawah	99,02	99,30	99,15	99,06	98,96	98,85	98,75
Sanggau	96,21	97,59	97,34	97,06	97,58	98,05	98,07
Ketapang	94,07	96,11	96,52	96,73	96,94	97,18	97,38
Sintang	95,83	97,80	97,60	98,42	98,68	97,99	98,52
Kapuas Hulu	97,24	100,00	99,36	99,02	99,08	98,35	98,14
Sekadau	97,71	98,46	98,23	98,25	97,80	98,24	98,20
Melawi	96,28	94,90	95,15	95,86	95,27	95,73	95,76
Kayong Utara	98,09	98,78	98,21	98,15	97,81	98,37	98,14
Kubu Raya	96,79	96,56	96,85	97,63	97,54	97,61	97,91
Kota Pontianak	96,23	94,91	95,69	95,65	96,05	95,93	96,11
Kota Singkawang	98,72	98,82	98,59	98,69	98,70	98,49	98,52
Kalimantan Barat	96,58	97,06	97,08	97,35	97,42	97,52	97,70

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3, Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang sekolah dasar di Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2017 hingga 2023, dari 96,58 persen pada tahun 2017 menjadi 97,70 persen pada tahun 2023. Capaian ini mencerminkan perbaikan akses pendidikan dasar yang semakin merata dan inklusif.

Beberapa kabupaten/kota mencatat APM yang sangat tinggi dan konsisten mendekati angka ideal 100 persen. Kabupaten Kapuas Hulu bahkan mencapai 100 persen pada tahun 2018, menjadi satu-satunya daerah dengan capaian sempurna selama periode ini. Kota Singkawang dan Kabupaten Mempawah juga menunjukkan kinerja yang stabil, dengan APM di atas 98 persen hampir setiap tahun. Hal ini menunjukkan efektivitas kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan dasar dan dukungan infrastruktur yang relatif merata.

Namun demikian, terdapat beberapa daerah yang mencatat APM relatif lebih rendah dari rata-rata provinsi, antara lain Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak, dan Kota Pontianak. Kabupaten Melawi secara konsisten mencatat APM di bawah 96 persen, dengan capaian terendah sebesar 94,90 persen pada tahun 2018 dan hanya meningkat menjadi 95,76 persen pada 2023. Kabupaten Landak sempat stagnan pada angka 95,39 persen selama dua tahun berturut-turut (2018-2019), meskipun menunjukkan peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya. Kota Pontianak, sebagai ibu kota provinsi, justru mencatat APM yang fluktuatif di kisaran 95-96 persen dan belum menunjukkan keunggulan signifikan.

Secara umum, disparitas antarwilayah tidak terlalu ekstrem, namun ketimpangan tetap ada dan perlu mendapat perhatian. Beberapa daerah pedalaman seperti Kapuas Hulu berhasil mencatat APM tinggi, sementara daerah pedalaman lainnya seperti Melawi dan Landak tertinggal. Hal ini menandakan bahwa faktor geografis bukan satu-satunya penentu keberhasilan pendidikan dasar; peran kebijakan, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat juga sangat berpengaruh.

Kabupaten Sambas dan Ketapang menjadi contoh daerah yang menunjukkan tren peningkatan signifikan. APM di Sambas meningkat dari 97,04 persen pada 2017 menjadi 98,48 persen pada 2023, sementara Ketapang naik dari 94,07 persen menjadi 97,38 persen. Capaian ini menegaskan bahwa intervensi kebijakan pendidikan di daerah tersebut cukup efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dasar.

Tabel 1.4
Angka Partisipasi Murni (SMP/MTs/Paket B)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	63,82	60,99	62,83	62,81	63,36	63,99	72,87
Bengkayang	51,45	54,49	58,43	58,42	61,80	61,41	65,01
Landak	62,37	64,25	65,56	66,07	66,76	65,60	67,49
Mempawah	57,08	55,38	54,98	58,01	58,06	58,09	73,50
Sanggau	60,67	62,00	63,73	65,84	65,32	65,79	71,07
Ketapang	69,03	69,62	69,48	71,07	71,30	71,60	73,52
Sintang	53,79	54,73	53,80	54,63	57,63	56,87	67,84
Kapuas Hulu	66,67	64,29	67,23	67,60	67,88	68,25	72,85
Sekadau	67,30	64,92	65,02	65,76	65,54	65,74	66,56
Melawi	64,32	64,60	65,05	64,93	65,25	64,92	65,39
Kayong Utara	78,74	80,96	81,29	82,04	81,76	81,40	81,74
Kubu Raya	80,05	82,26	81,11	81,33	80,76	80,14	70,47
Kota Pontianak	65,57	66,56	68,32	70,99	71,39	72,23	73,33
Kota Singkawang	69,20	73,23	72,85	72,64	73,39	73,92	74,17
Kalimantan Barat	65,19	65,91	66,67	67,42	68,11	68,32	70,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4, APM jenjang SMP di Kalimantan Barat mengalami peningkatan perlahan namun konsisten, dari 65,19 persen pada tahun 2017 menjadi 70,85 persen pada tahun 2023. Meskipun terdapat kemajuan, angka ini masih jauh dari ideal, menunjukkan bahwa masih banyak anak usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan sesuai kelompok usianya.

Kabupaten Kayong Utara mencatat capaian tertinggi secara konsisten, dengan APM mencapai 82,04 persen pada 2020 dan tetap berada di atas 81 persen hingga 2023. Ini mengindikasikan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan menengah pertama di wilayah tersebut sudah relatif baik. Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan Kubu Raya juga tergolong memiliki APM tinggi. Namun, Kubu Raya mengalami penurunan signifikan pada 2023, dari 80,14 persen menjadi 70,47 persen, yang perlu menjadi perhatian. Kota Singkawang mencatat tren peningkatan stabil dari 69,20 persen pada 2017 menjadi 74,17 persen pada 2023, menjadikannya daerah dengan APM tertinggi kedua.

Sebaliknya, beberapa kabupaten menunjukkan capaian APM yang rendah, khususnya di awal periode. Kabupaten Bengkayang, Mempawah, dan Sintang mencatat APM di bawah 60 persen, meskipun membaik pada tahun-tahun akhir. Mempawah, misalnya, meningkat tajam dari 58,09 persen pada 2022 menjadi 73,50 persen pada 2023. Sintang dan Sambas juga menunjukkan lonjakan tajam dalam setahun terakhir, yang mengindikasikan adanya upaya percepatan akses pendidikan.

Namun, beberapa daerah seperti Sekadau dan Melawi menunjukkan stagnasi. Melawi hanya mengalami kenaikan sekitar 1 persen dalam tujuh tahun (dari 64,32 persen menjadi 65,39 persen), menandakan masih adanya hambatan struktural dalam menjangkau siswa SMP, seperti keterbatasan infrastruktur, ekonomi keluarga, dan faktor budaya.

Rendahnya APM SMP dibanding jenjang SD menunjukkan potensi putus sekolah pada transisi SD ke SMP. Hal ini menuntut kebijakan yang lebih fokus pada penguatan transisi antarjenjang, termasuk penyediaan sekolah menengah pertama, subsidi biaya pendidikan, transportasi, dan program advokasi pentingnya pendidikan menengah.

Berdasarkan Tabel 1.5, APM jenjang SMA di Kalimantan Barat pada 2017-2023 menunjukkan peningkatan yang relatif lambat, dari 50,96 persen menjadi 54,76 persen. Artinya, hampir setengah dari remaja usia 16-18 tahun di provinsi ini belum menempuh pendidikan menengah atas secara tepat waktu.

Kota Pontianak dan Kota Singkawang menjadi dua daerah dengan capaian APM tertinggi pada tahun 2023, masing-masing sebesar 63,09 persen dan 63,18 persen, dan konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Hal ini mencerminkan peran penting infrastruktur, sosial ekonomi, dan kesadaran masyarakat kota terhadap pendidikan lanjutan. Kabupaten Sambas mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2023, dari 48,52 persen menjadi 63,68 persen. Peningkatan ini perlu dikaji lebih lanjut apakah karena intervensi kebijakan, perbaikan data, atau program afirmatif.

Tabel 1.5
Angka Partisipasi Murni (SMA/MA/Paket C)
Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2017-2023 (Persen)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sambas	52,96	48,56	49,31	50,26	49,48	48,52	63,68
Bengkayang	45,30	49,42	50,31	50,26	50,38	50,55	57,71
Landak	54,92	58,49	58,29	58,65	59,32	60,32	56,38
Mempawah	51,86	54,51	55,65	55,71	54,80	53,86	57,83
Sanggau	38,67	41,71	42,39	42,50	43,39	42,68	40,56
Ketapang	51,12	46,26	46,09	46,70	46,73	46,77	46,59
Sintang	42,22	45,00	44,77	44,79	45,09	45,35	56,53
Kapuas Hulu	55,75	51,71	51,67	51,78	50,90	57,17	55,99
Sekadau	42,80	45,20	45,99	46,41	47,00	48,01	58,94
Melawi	42,69	41,16	41,77	42,11	42,69	43,43	53,27
Kayong Utara	58,42	56,00	56,68	56,72	56,65	56,55	45,62
Kubu Raya	49,07	52,26	53,24	52,16	53,24	53,34	49,19
Kota Pontianak	60,98	61,40	61,39	61,27	61,47	61,61	63,09
Kota Singkawang	60,40	60,00	59,21	59,56	58,84	59,54	63,18
Kalimantan Barat	50,96	51,16	51,21	51,70	51,77	51,87	54,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025

Namun, sejumlah daerah seperti Kabupaten Sanggau dan Ketapang masih mencatat APM yang rendah, yaitu 40,56 persen dan 46,59 persen pada 2023. Sanggau bahkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan kemungkinan hambatan serius seperti kurangnya fasilitas, kemiskinan, atau rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan tingkat atas.

Beberapa daerah lain menunjukkan perbaikan. Melawi meningkat dari 42,69 persen (2021) menjadi 53,27 persen (2023), dan Sintang dari 45,35 persen menjadi 56,53 persen. Ini menunjukkan bahwa intervensi kebijakan mulai membuahkan hasil di beberapa daerah. Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara justru mengalami penurunan drastis dari 56,55 persen pada 2022 menjadi hanya 45,62 persen pada 2023, yang berbanding terbalik dengan capaian tinggi pada jenjang SMP.

Secara keseluruhan, capaian APM jenjang SMA yang masih rendah menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di Kalimantan Barat semakin kompleks

pada jenjang lebih tinggi. Ini berdampak langsung pada kualitas tenaga kerja masa depan dan kemampuan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya manusia.

Pemerintah perlu menyusun strategi khusus guna memperluas akses pendidikan jenjang SMA, antara lain melalui pembangunan sekolah baru, pemberian beasiswa, penempatan guru di daerah terpencil, serta kampanye kesadaran pentingnya pendidikan. Selain itu, evaluasi rutin terhadap capaian Angka Partisipasi Murni (APM) dan analisis terhadap penyebab stagnasi sangat penting dilakukan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Pendidikan merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, dapat tercipta generasi yang cerdas, berwawasan luas, dan siap menghadapi tantangan sosial maupun ekonomi. Pendidikan berfungsi sebagai fondasi utama dalam pengembangan masyarakat, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin meningkat pula pengetahuan dan keterampilannya. Hal ini secara langsung akan mendorong peningkatan produktivitas individu. Selain itu, pendidikan juga berperan penting dalam menghapus kebodohan dan menurunkan tingkat kemiskinan (Utami & Udjianto, 2023).

Menurut Sukirno (2013), pendidikan merupakan bentuk investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan keterampilan melalui pendidikan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain, pendidikan diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi melalui penguatan kapasitas individu.

Widayawati dalam Julianto & Utari (2020) menyatakan bahwa pendidikan juga dapat dilihat sebagai bentuk konsumsi masyarakat yang meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Pergeseran struktur pasar tenaga kerja dari sektor padat karya tak terdidik ke sektor padat pengetahuan dan terampil sebagai akibat

dari industrialisasi, mendorong masyarakat untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Masyarakat pun terdorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan harapan dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (*sustainable development*), sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama dalam membentuk modal manusia (*human capital*). Keduanya berperan penting dalam mendukung proses produksi serta aktivitas ekonomi lainnya. Pendidikan dan kesehatan bukan hanya alat untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masa depan (Muyadi, 2003).

Oleh karena itu, pemberdayaan gender dan peningkatan tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan dua aspek fundamental yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Pemberdayaan gender tidak hanya memperluas akses dan peluang bagi perempuan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan dunia kerja, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Sementara itu, tingkat pendidikan yang ditamatkan mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar dapat berpartisipasi aktif dan produktif dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh kedua faktor tersebut sangat penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif, yang mampu memperkuat aspek sosial serta pendidikan demi meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya dari aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan demografis, seperti pemberdayaan gender dan tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan teori modal

manusia (Caire & Becker, 1967), pendidikan merupakan modal penting yang meningkatkan produktivitas dan kemampuan individu untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, teori pemberdayaan gender Kabeer (2005) menyatakan bahwa partisipasi perempuan yang setara dalam perekonomian dapat memperluas basis tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

Di Kalimantan Barat, meskipun telah terjadi kemajuan dalam peningkatan akses pendidikan dan upaya memperbaiki pemberdayaan gender, permasalahan terkait ketimpangan gender dan variasi capaian pendidikan masih menjadi tantangan. Kondisi tersebut diduga memengaruhi potensi pertumbuhan ekonomi wilayah secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami sejauh mana pemberdayaan gender dan angka partisipasi murni pendidikan berdasarkan jenjang yang ditamatkan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah Pemberdayaan gender berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat?
2. Apakah Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat?
3. Apakah Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat?
4. Apakah Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gender terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.
2. Untuk menguji dan menganalisis Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar berpangaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.

3. Untuk menguji dan menganalisis Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama berpangaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.
4. Untuk menguji dan menganalisis Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas berpangaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara pemberdayaan gender, angka partisipasi murni sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memasukkan variabel pemberdayaan gender dan tingkat pendidikan penduduk sebagai faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana faktor sosial dan demografis berperan dalam pembangunan ekonomi di daerah dengan karakteristik sosial budaya yang unik seperti Kalimantan Barat.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini menyediakan data empiris dan analisis yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mengoptimalkan program-program yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pendidikan serta pemberdayaan gender. Hal ini penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan produktif yang dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah.